



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

INSPEKTORAT

Jln. Huta Bulu – Mejan Telp. (0632) 21393

Website : www.tobasamosirkab.com Email : inspektortobasa@gmail.com

BALIGE

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN TOBA NOMOR: 12 TAHUN 2020

TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT KABUPATEN TOBA TAHUN 2021

INSPEKTUR KABUPATEN TOBA SAMOSIR

- Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan pengawasan intern pemerintahan di Kabupaten Toba yang efektif, efisien, dan akuntabel, perlu disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2021 bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) daerah yang terarah dan terkoordinasi dan di tetapkan dalam Keputusan Inspektur Kabupaten Toba.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan, Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;

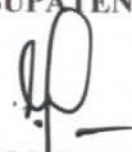
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 Tahun 2012 Tentang petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2017;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir;
17. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 64 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Toba Samosir.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) TAHUN 2021;
- Kesatu : Menetapkan program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Toba Samosir Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : PKPT Tahun 2021 merupakan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan sebagaimana diatur dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Ketiga : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balige
Pada Tanggal : 14 Desember 2020.

**INSPEKTUR
KABUPATEN TOBA,**



**Drs. WALLEN HUTAHEAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660609 199203 1 007**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR TOBA
NOMOR : TAHUN 2020
TANGGAL : 14 DESEMBER 2020

URAIAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KABUPATEN TOBA TAHUN 2021

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Toba, Inspektorat Kabupaten Toba menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2021 dengan objek pengawasan seluruh SKPD, beberapa kegiatan pembinaan dan pengawasan yang tertuang dalam PKPT antara lain: pengawasan internal secara berkala, revidi laporan keuangan daerah, revidi rencana kerja anggaran, Revidi Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD), Revidi Laporan Kinerja (LK), Revidi DAK, Revidi Penyerapan Anggaran, Revidi penyerapan anggaran dan Revidi Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa, Evaluasi laporan kinerja penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintahan daerah, monitoring evaluasi yang meliputi pengadaan barang dan jasa pemerintah, bantuan sosial, hibah, BOS, BOP dan RA-PPK, JKN, Pemeriksaan serentak kas Opname, Pemeriksaan Pajak Pusat dan PNBP dan Evaluasi, Monitoring Dana Desa. Tindak lanjut dan pemutakhiran data seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Tahun 2021 bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta pemerintahan yang bersih dan akuntabel (*clean governance*).

Pengawasan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Toba bersifat pengendalian intern terhadap penyelenggaraan pemerintah, sehingga dalam pelaksanaan pengawasan mengutamakan pembinaan, pembenahan, dan pencegahan terhadap penyimpangan serta resiko kesalahan yang terjadi, baik dalam pengelolaan administrasi maupun pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai lingkup kewenangan serta tugas dan fungsi dengan memenuhi prioritas sarana pengawasan yang tepat dan relevan untuk diterapkan, sesuai dengan motto Inspektorat Kabupaten Toba **“Mencegah Penyimpangan dan Melakukan Pembinaan”**.

Agar terlaksananya tujuan dari motto, tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Toba maka penyusunan PKPT dijelaskan dengan visi dan misi yaitu:

Visi : Terwujudnya Pengawasan yang Berkualitas Menuju Tobasa Hebat Tahun 2021.

Misi : 1. Meningkatkan kualitas SDM dan meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan;
2. Meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah;
3. Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
4. Meningkatkan koordinasi pengawasan;
5. Meningkatkan penyelesaian kerugian daerah melalui Majelis TP-TGR, sehingga kerugian di Kabupaten Toba semakin lama semakin berkurang.

Dalam pelaksanaan kegiatan Inspektorat Kabupaten Toba berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir dan Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 64 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Toba Samosir serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. TUJUAN

Penetapan PKPT Tahun 2021 bertujuan untuk:

1. Pedoman dalam melakukan penugasan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba;
2. Mengatur jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba;
3. Menyelaraskan pengawasan dalam rangka mencegah tumpang tindih pemeriksaan dengan APIP lain untuk lebih efisien, efektif, dan ekonomis dalam pelaksanaan pengawasan.

C. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Ruang lingkup pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi:

1. Pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan terhadap:
 - a. Pembagian urusan pemerintahan;
 - b. Keuangan daerah;
 - c. Perencanaan pembangunan daerah;
 - d. Pelayanan publik daerah;
 - e. Kebijakan daerah;
 - f. Kepegawaian daerah.
2. Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan terhadap:
 - a. Urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - b. Urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. Urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - f. Urusan pemerintahan bidang sosial;
 - g. Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
 - h. Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - i. Urusan pemerintahan bidang pangan;
 - j. Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - k. Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - l. Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - m. Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - n. Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - o. Urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - p. Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 - q. Urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - r. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
 - s. Urusan pemerintahan bidang perdagangan.

D. PENGAWASAN

Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi penyusunan rencana, pelaksanaan dan hasil pengawasan, antara lain:

1. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan yang didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan guna menindaklanjuti dan pemeriksaan yang berulang-ulang.
2. Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Toba melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa dengan berpedoman pada PKPT, dalam bentuk:
 - a. Pemeriksaan secara berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, dan urusan pemerintahan daerah lainnya. Selain dengan cara menghimpun informasi untuk menguji dan menilai kelayakan pelaksanaan kegiatan dan atau laporan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah juga menilai:

- Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SKPD);
 - Pengelolaan Asset Daerah;
 - Ketaatan pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan;
 - Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.
- b. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan.
 - c. Pemeriksaan tertentu dan pemeriksaan terhadap laporan mengenai adanya indikasi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme serta pengaduan masyarakat.
 - d. Hasil pemeriksaan, monitoring dan evaluasi dituangkan dalam hasil pemeriksaan monitoring dan evaluasi.

E. KEGIATAN DAN SARAN PENGAWASAN

Untuk mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berkualitas, kompetitif, produktif, inovatif, kreatif, efisien, dan efektif secara optimal dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, bersih, dan bebas dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, Inspektorat Kabupaten Toba menyusun program-program pengawasan Tahun 2021 dengan sasaran dan kegiatan sebagai berikut:

1. Sasaran pengawasan Tahun 2021 terdiri dari:
 - a. Pemeriksaan pelaksanaan urusan wajib pemerintahan
Pemeriksaan pelaksanaan urusan wajib pemerintahan kabupaten berdasarkan penajaman prioritas dengan pemilihan secara cermat objek pemeriksaaan/pengawasan serta saran yang bersifat kebijakan strategis atas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - b. Penetapan objek pemeriksaan/pengawasan
Penetapan 318 objek pemeriksaan/pengawasan untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan internal secara berkala tahun 2021 dan objek pemeriksaan/pengawasan untuk kegiatan pengawasan yang lain (monitoring dan evaluasi, reviu serta audit kinerja) berdasarkan hasil penilaian terhadap laporan hasil pengawasan tahun sebelumnya, disamping itu Pemerintah Kabupaten Toba.
 - c. Kegiatan Pengawasan
Kegiatan pengawasan terhadap objek pengawasan pada lingkup pemerintah Kabupaten Toba tersebut diimplemntasikan melalui bentuk kegiatan pengawasan sebagai berikut:
 - 1) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (pemeriksaan reguler) tentang pedoman umum bantuan keuangan desa dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Inspektorat Kabupaten Toba mengoptimalkan kegiatan rutin PKPT untuk seluruh kegiatan SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Toba sesuai dengan tupoksi termasuk wilayah desa/kelurahan pada kecamatan termasuk Pemeriksaan serentak kas Opname dan Pemeriksaan Pajak Pusat dan PNPB sehingga upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan menjadi maksimal.
 - 2) Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah dan bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti keluhan oleh individu, masyarakat, dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan di pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Kegiatan reviu atas Laporan Keuangan Daerah merupakan salah satu kewajiban Inspektorat Daerah selaku APIP dalam rangka meberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporaan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, keandalan informasi yang disajikan harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dengan prioritas:
 - Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
 - Reviu Rencana Strategis (Renstra)
 - Reviu dokumen perencanaan dan anggaran daerah (RKA);
 - Reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);

- Reviu laporan kinerja Instansi Pemerintah (LK);
 - Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - Reviu DAK Fisik;
 - Reviu Penyerapan Anggaran;
 - Reviu Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa
 - Reviu SSH/ASB/HSPK
 - Reviu KUAPPAS
 - Reviu HPS
 - Reviu Laporan Penyerapan DAU
 - Reviu Dana Hibah
 - Reviu Kepatuhan Pengelolaan BMD
- d. Kegiatan evaluasi
- Dilakukan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan tugas pokok instansi pemerintahan lingkup pemerintahan Kabupaten Toba Samosir sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaporan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan. Kegiatan evaluasi meliputi:
- 1) Monitoring dan evaluasi Bansos, Hibah dan BOS dan JKN ;
 - 2) Evaluasi reformasi dan birokrasi;
 - 3) Evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan;
 - 4) Evaluasi pelaksanaan program strategis nasional.
 - 5) Evaluasi SPIP
 - 6) Evaluasi Benturan Kepentingan
 - 7) Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender
 - 8) Evaluasi dan Penilaian atas efektifitas proses tata kelola
 - 9) Evaluasi dan Penilaian atas efektifitas Manajemen Resiko
 - 10) Evaluasi Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (APIP)
 - 11) Monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP
 - 12) Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Korupsi
- e. Kegiatan pengawasan lainnya
- Kegiatan pengawasan lainnya meliputi :
- 1) Pendampingan dan asistensi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual;
 - 2) Fasilitas penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
 - 3) Perhitungan Kerugian Negara
 - 4) Penyusunan Standar Operasional Prosedur di bidang pengawasan;
 - 5) Koordinasi program pengawasan.
 - 6) Penilaian Zona Integritas
- f. Program kerja pemeriksaan
- Sebelum melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan, setiap tim harus terlebih dahulu menyiapkan program kerja pemeriksaan (PKP), agar sasaran pemeriksaan lebih jelas dan terperinci sehingga hasil yang diharapkan dapat dicapai dengan maksimal.
- g. Rapat arahan dan bimbingan
- Kemudian tahapan selanjutnya adalah melakukan rapat untuk pembelian arahan dan bimbingan terkait proses dalam melakukan pemeriksaan yang dipimpin oleh penanggung jawab, dan ketua tim.
- h. Expose
- Setelah kegiatan pengawasan selesai dilaksanakan, setiap tim melakukan expose yang dikoordinir oleh Bagian Evaluasi dan Pelaporan terkait hal-hal yang ditentukan dilapangan.
2. Objek Pemeriksaan/Pengawasan
- Objek pemeriksaan/pengawasan dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Toba terdiri dari:
- a. Jumlah auditan di Kabupaten Toba meliputi:
- 1) SKPD/Kecamatan : 44 OPD

2) Pemeriksaan Stock Opname Kas	: 44 OPD
3) Pemeriksaan Pajak dan PNPB	: 44 OPD
4) Desa/Kelurahan	: 231/13
5) Dana Bos SD + SMP	: 224 +51
6) Pengaduan Masyarakat	: 20 kasus
7) Pemeriksaan Khusus	: 10 kasus
8) Audit JKN	: 19 JKN
9) Audit PBJ	: 11 OPD
10) Audit Probity	: 11 OPD
11) Audit Perijinan	: 1 OP
12) Audit Non Perijinan	: 1 OP
13) Monitoring tindak lanjut	: <u>50 OP</u>
JUMLAH	: 772 OP

b. Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	: 1 OP
c. Reviu Rencana Strategis (RENSTRA)	: 44 OPD
d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD)	: 44 OPD
e. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	: 44 OPD
f. Reviu Laporan Keuangan (LK)	: 1 OPD
g. Reviu Laporan Kinerja (LAKIP)	: 44 OPD
h. Reviu LPPD	: 1 OP
i. Reviu KUAPPAS	: 1 OP
j. Reviu/Pemantauan dan Evaluasi DAK Fisik	: 11 OPD
k. Reviu Penyerapan Anggaran	: 2 OPD
l. Reviu Penyerapan pengadaan barang dan jasa	: 2 OPD
m. Reviu SSH/ASB/HSPK	: 1 OPD
n. Reviu HPS	: 1 OPD
o. Reviu Laporan Penyerapan DAU	: 1 OPD
p. Reviu Dana Hibah	: 1 OP
q. Reviu Kepatuhan Pengelolaan BMD	: 1 OP
r. Evaluasi Laporan Kinerja	: 44 OPD

JUMLAH : 244 OP

3. Anggota Tim Pengawasan

Anggota tim pengawasan Inspektorat Kabupaten Toba terdiri dari:

- Penanggung Jawab : 1 orang
- Wakil Penanggung Jawab : 1 orang
- Pengendali Tekhnis : 1 orang
- Ketua Tim : 1 orang
- Anggota : 3 orang

4. Indikator

a. *Input* (masukan)

Input pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan terdiri dari sumber daya manusia dan anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1) Sumber daya manusia (SDM)

Disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Toba Samosir dan Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 64 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Toba Samosir terdiri dari:

- a) Inspektur
- b) Sekretariat yang membawahi

- Sub Bagian Keuangan dan Program
 - Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 - Sub Adminstrasi Umum dan Kepegawaian
- c) Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, dan IV
- d) Jabatan Fungsional Auditor.

b. *Output* (keluaran)

Capaian keluaran dari pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2021 adalah terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa Kabupaten Toba sesuai dengan jadwal capaian sasaran pengawasan serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. *Outcome* (hasil)

Capaian hasil dari pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2021 adalah memperkecil terjadinya penyimpangan dan resiko kesalahan dalam pengelolaan keuangan, kepegawaian dan asset dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Sehingga tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik guna mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Toba. Salah satu capaian yang diharapkan dapat tercapai pada Tahun 2021 adalah tetap dipertahankannya penilaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba.

d. Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan

Laporan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Toba Samosir didokumentasikan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan (LHP) dan Laporan Hasil Reviu (LHR), Adapun rencana penerbitan LHP dan LHR Tahun 2020 secara kuantitatif setiap bulan dapat dirincikan sebagai berikut:

Januari	: 3 LHP
Februari	: 4 LHP
Maret	: 25 LHP
April	: 6 LHP
Mei	: 6 LHP
Juni	: 15 LHP
Juli	: 16 LHP
Agustus	: 16 LHP
September	: 18 LHP
Oktober	: 18 LHP
November	: 29 LHP
Desember	: 14 <u>LHP</u>
JUMLAH	: 170 LHP/LHR

II. PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT

Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan (LHP) merupakan hasil yang konkret dari kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga harus disusun secara objektif, propesional, independen, tidak mencari-cari kesalahan, efektif, mendidik/membina dan dinamis.

Penyelesaian tindak lanjut dilaksanakan setiap bulan melalui kegiatan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan, inventarisasi dan pemutakhiran data tindak lanjut dengan objek pemeriksaan/pengawasan dengan harapan dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi pemeriksaan;
2. Jumlah temuan yang masih dalam proses penyelesaian;
3. Jumlah temuan yang belum ditindaklanjuti sama sekali; dan
4. Jumlah kerugian negara/daerah yang menjadi temuan pemeriksaan/pengawasan.

III. PENUTUP

Fungsi pengawasan internal pemerintah secara hakiki adalah untuk melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efisien, efektif dan taat terhadap peraturan perundang-undangan serta terlindungnya kekayaan negara/daerah dan setiap upaya penyimpangan.

Inspektorat Kabupaten Toba Samosir sebagai pelaksana pengawasan intern pemerintah daerah harus mampu merespon secara signifikan berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi melalui program dan kegiatan yang ditetapkan dalam satu kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa yang diimplementasikan melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Demikian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) ini disusun untuk dipedomani sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balige

Pada Tanggal : 14 Desember 2020.

**INSPEKTUR
KABUPATEN TOBA,**



**Drs. WALDEN HUTAHEAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660609 199203 1 007**

INSPEKTORAT KABUPATEN TOBA
Program Kerja Pengawasan Tahunan
Tahun 2021

No.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	Tujuan Audit	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu			Anggaran Biaya (000)			RMP	RAP	LHA	Peralatan	Keterangan
					DK	LK	HP	DK	LK	Total					
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6+7	9	10	11 = 9+10	12	13	14	15	16
1	Dinas Pertanian dan Perikanan	Audit Operasional	Tahun 2021	1 P, 1 WP, 1 PT, 1 KT, 4 AT	10	-	10	5.025.000	-	5.025.000	Agustus 2021	Desember 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
2	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Audit Operasional	Tahun 2021	1 P, 1 WP, 1 PT, 1 KT, 3 AT	7	-	7	3.075.000	-	3.075.000	Agustus 2021	Desember 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Audit Operasional	Tahun 2021	1 P, 1 WP, 1 PT, 1 KT, 3 AT	7	-	7	3.075.000	-	3.075.000	Agustus 2021	Desember 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Audit Operasional	Tahun 2021	1 P, 1 WP, 1 PT, 1 KT, 3 AT	5	-	5	2.175.000	-	2.175.000	Agustus 2021	Desember 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
5	Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana	Audit Operasional	Tahun 2021	1 P, 1 WP, 1 PT, 1 KT, 3 AT	5	-	5	2.175.000	-	2.175.000	Agustus 2021	Desember 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Audit Operasional	Tahun 2021	1 P, 1 WP, 1 PT, 1 KT, 3 AT	5	-	5	2.175.000	-	2.175.000	Agustus 2021	Desember 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Audit Operasional	Tahun 2021	1 P, 1 WP, 1 PT, 1 KT, 3 AT	5	-	5	2.175.000	-	2.175.000	Agustus 2021	Desember 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Audit Operasional	Tahun 2021	1 P, 1 WP, 1 PT, 1 KT, 4 AT	14	-	14	5.025.000	-	5.025.000	Agustus 2021	Desember 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
9	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Audit Operasional	Tahun 2021	1 P, 1 WP, 1 PT, 1 KT, 4 AT	14	-	14	5.025.000	-	5.025.000	Agustus 2021	Desember 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Audit Operasional	Tahun 2021	1 P, 1 WP, 1 PT, 1 KT, 3 AT	7	-	7	3.600.000	-	3.600.000	Agustus 2021	Desember 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
11	Dinas Tenaga Kerja	Audit Operasional	Tahun 2021	1 P, 1 WP, 1 PT, 1 KT, 3 AT	5	-	5	2.175.000	-	2.175.000	Agustus 2021	Desember 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	Audit Operasional	Tahun 2021	1 P, 1 WP, 1 PT, 1 KT, 3 AT	5	-	5	2.175.000	-	2.175.000	Agustus 2021	Desember 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
13	Badan Perencanaan Daerah	Audit Operasional	Tahun 2021	1 P, 1 WP, 1 PT, 1 KT, 3 AT	5	-	5	2.175.000	-	2.175.000	Agustus 2021	Desember 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
14	Satuan Polisi Pamong Praja	Audit Operasional	Tahun 2021	1 P, 1 WP, 1 PT, 1 KT, 3 AT	5	-	5	2.175.000	-	2.175.000	Agustus 2021	Desember 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
15	Dinas Kesehatan	Audit Operasional	Tahun 2021	1 P, 1 WP, 1 PT, 1 KT, 3 AT	7	-	7	3.075.000	-	3.075.000	Agustus 2021	Desember 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Audit Operasional	Tahun 2021	1 P, 1 WP, 1 PT, 1 KT, 3 AT	5	-	5	3.075.000	-	3.075.000	Agustus 2021	Desember 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	Audit Operasional	Tahun 2021	1 P, 1 WP, 1 PT, 1 KT, 3 AT	5	-	5	2.175.000	-	2.175.000	Agustus 2021	Desember 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Audit Operasional	Tahun 2021	1 P, 1 WP, 1 PT, 1 KT, 3 AT	5	-	5	2.175.000	-	2.175.000	Agustus 2021	Desember 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
19	Dinas Sosial	Audit Operasional	Tahun 2021	1 P, 1 WP, 1 PT, 1 KT, 3 AT	5	-	5	2.175.000	-	2.175.000	Agustus 2021	Desember 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
20	Sekretariat Daerah	Audit Operasional	Tahun 2021	1 P, 1 WP, 1 PT, 1 KT, 3 AT	10	-	10	3.600.000	-	3.600.000	Agustus 2021	Desember 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
21	BLUD (RSUD) Porsea	Audit Operasional	Tahun 2021	1 P, 1 WP, 1 PT, 1 KT, 3 AT	10	-	10	2.900.000	-	2.900.000	Agustus 2021	Desember 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
22	Dinas Pendidikan	Audit Operasional	Tahun 2021	1 P, 1 WP, 1 PT, 1 KT, 3 AT	10	-	10	3.600.000	-	3.600.000	Agustus 2021	Desember 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
23	Dinas Perhubungan	Audit Operasional	Tahun 2021	1 P, 1 WP, 1 PT, 1 KT, 3 AT	7	-	7	2.175.000	-	2.175.000	Agustus 2021	Desember 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
24	Dinas Lingkungan Hidup	Audit Operasional	Tahun 2021	1 P, 1 WP, 1 PT, 1 KT, 3 AT	5	-	5	2.175.000	-	2.175.000	Agustus 2021	Desember 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
25	Dinas Ketahanan Pangan	Audit Operasional	Tahun 2021	1 P, 1 WP, 1 PT, 1 KT, 3 AT	7	-	7	3.075.000	-	3.075.000	Agustus 2021	Desember 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
26	Badan Kepegawaian Daerah	Audit Operasional	Tahun 2021	1 P, 1 WP, 1 PT, 1 KT, 3 AT	5	-	5	2.175.000	-	2.175.000	Agustus 2021	Desember 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
27	Sekretariat DPRD	Audit Operasional	Tahun 2021	1 P, 1 WP, 1 PT, 1 KT, 3 AT	7	-	7	3.000.000	-	3.000.000	Agustus 2021	Desember 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
28	Kecamatan Borbor	Audit Operasional	Tahun 2021	1 P, 1 WP, 1 PT, 1 KT, 2 AT	3	-	3	2.250.000	-	2.250.000	Agustus 2021	Desember 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
29	Kecamatan Sigumpar	Audit Operasional	Tahun 2021	1 P, 1 WP, 1 PT, 1 KT, 2 AT	3	-	3	1.125.000	-	4.675.000	Agustus 2021	Desember 2021	1	1 PC, 1 Laptop	

1	2	3	4	5	6	7	8 = 6+7	9	10	11 = 9+10	12	13	14	15	16
30	Kecamatan Pintu Pohan Meranti	Audit Operasional	Tahun 2021	1 P, 1 WP, 1 PT, 1 KT, 2 AT	3	-	3	2.250.000	-	2.250.000	Agustus 2021	Desember 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
31	Kecamatan Balige	Audit Operasional	Tahun 2021	1 P, 1 WP, 1 PT, 1 KT, 2 AT	3	-	3	1.125.000	-	1.125.000	Agustus 2021	Desember 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
32	Kecamatan Laguboti	Audit Operasional	Tahun 2021	1 P, 1 WP, 1 PT, 1 KT, 2 AT	3	-	3	1.125.000	-	1.125.000	Agustus 2021	Desember 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
33	Kecamatan Lumban Julu	Audit Operasional	Tahun 2021	1 P, 1 WP, 1 PT, 1 KT, 2 AT	3	-	3	1.650.000	-	1.650.000	Agustus 2021	Desember 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
34	Kecamatan Tampahan	Audit Operasional	Tahun 2021	1 P, 1 WP, 1 PT, 1 KT, 2 AT	3	-	3	1.125.000	-	1.125.000	Agustus 2021	Desember 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
35	Kecamatan Nassau	Audit Operasional	Tahun 2021	1 P, 1 WP, 1 PT, 1 KT, 2 AT	3	-	3	2.250.000	-	2.250.000	Agustus 2021	Desember 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
36	Kecamatan Borbor	Audit Operasional	Tahun 2019	1P, 1 WP, 2 PT, 2 KT, 3 AT	32	-	32	28.200.000	-	28.200.000	Januari 2021	Juli 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
37	Kecamatan Uluan	Audit Operasional	Tahun 2019	1P, 1 WP, 2 PT, 2 KT, 3 AT	33	-	33	19.500.000	-	19.500.000	Januari 2021	Juli 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
38	Kecamatan Parmaksian	Audit Operasional	Tahun 2019	1 P, 1 WP, 2 PT, 2 KT, 3 AT	25	-	25	14.800.000	-	14.800.000	Januari 2021	Juli 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
39	Kecamatan Sigumpar	Audit Operasional	Tahun 2019	1 P, 1 WP, 3 PT, 3 KT, 3 AT	25	-	25	10.875.000	-	10.875.000	Januari 2021	Juli 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
40	Kecamatan Pintu Pohan Meranti	Audit Operasional	Tahun 2019	1 P, 1 WP, 2 PT, 2 KT, 3 AT	16	-	16	14.100.000	-	14.100.000	Januari 2021	Juli 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
41	Kecamatan Bonatua Lunasi	Audit Operasional	Tahun 2019	1 P, 1 WP, 2 PT, 2 KT, 3 AT	24	-	24	14.400.000	-	14.400.000	Januari 2021	Juli 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
42	Kecamatan Siantar Narumonda	Audit Operasional	Tahun 2019	1 P, 1 WP, 2 PT, 2 KT, 3 AT	29	-	29	17.000.000	-	17.000.000	Januari 2021	Juli 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
43	Kecamatan Balige	Audit Operasional	Tahun 2019	1 P, 1 WP, 3 PT, 3 KT, 3 AT	71	-	71	30.075.000	-	30.075.000	Januari 2021	Juli 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
44	Kecamatan Habinsaran	Audit Operasional	Tahun 2019	1 P, 1 WP, 2 PT, 2 KT, 3 AT	43	-	43	37.500.000	-	37.500.000	Januari 2021	Juli 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
45	Kecamatan Porsea	Audit Operasional	Tahun 2019	1 P, 1 WP, 3 PT, 3 KT, 3 AT	30	-	30	15.700.000	-	15.700.000	Januari 2021	Juli 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
46	Kecamatan Laguboti	Audit Operasional	Tahun 2019	1 P, 1 WP, 3 PT, 3 KT, 3 AT	34	-	34	14.925.000	-	14.925.000	Januari 2021	Juli 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
47	Kecamatan Lumban Julu	Audit Operasional	Tahun 2019	1 P, 1 WP, 2 PT, 2 KT, 3 AT	30	-	30	19.140.000	-	19.140.000	Januari 2021	Juli 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
48	Kecamatan Silaen	Audit Operasional	Tahun 2019	1 P, 1 WP, 2 PT, 2 KT, 3 AT	46	-	46	27.100.000	-	27.100.000	Januari 2021	Juli 2021	1	1 PC, 1 Laptop	

1	2	3	4	5	6	7	8 = 6+7	9	10	11 = 9+10	12	13	14	15	16
49	Kecamatan Alibata	Audit Operasional Dana Desa/kelurahan	Tahun 2019	1 P, 1 WP, 3 PT, 3 KT, 3 AT	32	-	32	23.125.000	-	23.125.000	Januari 2021	Juli 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
50	Kecamatan Nassau	Audit Operasional Dana Desa/kelurahan	Tahun 2019	1 P, 1 WP, 2 PT, 2 KT, 3 AT	24	-	24	21.150.000	-	21.150.000	Januari 2021	Juli 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
51	Kecamatan Tampahan	Audit Operasional Dana Desa/kelurahan	Tahun 2019	1 P, 1 WP, 2 PT, 2 KT, 3 AT	19	-	19	8.400.000	-	8.400.000	Januari 2021	Juli 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
52	Pemeriksaan Khusus/Investigasi		--	1 P, 2 WP, 25 PT, 25 KT, 4 AT	150	-	150	62.000.000	-	62.000.000	Januari 2021	Desember 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
53	Sertijab		--	Tahun 2021 1 P, 2 WP, 25 PT, 25 KT, 4 AT	45	-	45	30.000.000	-	30.000.000	Januari 2021	Desember 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
54	Audit Dana BOS		--	Tahun 2021 1 P, 4 WP, 4 PT, 4 KT, 8 AT	16	-	16	11.675.000	-	11.675.000	November 2021	November 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
55	Audit JKN		--	Tahun 2021 1 P, 4 WP, 4 PT, 4 KT, 8 AT	16	-	16	10.390.000	-	10.390.000	November 2021	November 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
56	Audit Probity		--	Tahun 2021 1 P, 4 WP, 4 PT, 4 KT, 8 AT	4	-	4	7.125.000	-	7.125.000	September 2021	September 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
57	Audit PBI		--	Tahun 2021 1 P, 4 WP, 4 PT, 4 KT, 8 AT	4	-	4	7.125.000	-	7.125.000	September 2021	September 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
58	Audit Kepatuhan		--	Tahun 2021 1 P, 2 WP, 2 PT, 2 KT, 4 AT	4	-	4	2.850.000	-	2.850.000	Oktober 2021	Oktober 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
59	Pemeriksaan pajak pusat dan PNPB		--	Tahun 2021 1 P, 4 WP, 4 PT, 4 KT, 8 AT	5	-	5	13.100.000	-	13.100.000	Januari 2021	Januari 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
60	Pemeriksaan serentak kas opname		--	Tahun 2021 1 P, 4 WP, 4 PT, 4 KT, 8 AT	5	-	5	13.425.000	-	13.425.000	Januari 2021	Januari 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
61	Reviu LAKIP/PK		--	Tahun 2021 1 P, 1 WP, 1 PT, 1 KT, 3 AT	8	-	8	1.725.000	-	1.725.000	April 2021	April 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
62	Reviu LPPD		--	Tahun 2021 1 P, 1 WP, 1 PT, 1 KT, 3 AT	8	-	8	1.725.000	-	1.725.000	April 2021	April 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
63	Reviu LKPI		--	Tahun 2021 1 P, 1 WP, 1 PT, 1 KT, 3 AT	4	-	4	1.725.000	-	1.725.000	April 2021	April 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
64	Reviu RPJMD		--	Tahun 2021 1 P, 1 WP, 1 PT, 1 KT, 3 AT	15	-	15	1.725.000	-	1.725.000	Maret 2021	Desember 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
65	Reviu Renstra		--	Tahun 2021 1 P, 1 WP, 1 PT, 1 KT, 3 AT	4	-	4	1.725.000	-	1.725.000	Maret 2021	Desember 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
66	Reviu LK(LKPD)		--	Tahun 2021 1 P, 1 WP, 1 PT, 1 KT, 3 AT	12	-	12	1.725.000	-	1.725.000	Januari 2021	Februari 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
67	Reviu RKPD/Renja dan P.RKPD/P.renja		--	Tahun 2021 1 P, 1 WP, 1 PT, 1 KT, 3 AT	12	-	12	3.450.000	-	3.450.000	Juni 2021	November 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
68	Reviu RKA/RKA.P		--	Tahun 2021 1 P, 1 WP, 1 PT, 1 KT, 3 AT	8	-	8	3.450.000	-	3.450.000	Juni 2021	November 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
69	Reviu SSH		--	Tahun 2021 1 P, 1 WP, 1 PT, 1 KT, 3 AT	8	-	8	1.425.000	-	1.425.000	Juni 2021	November 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
70	Reviu ASB & HSPK		--	Tahun 2021 1 P, 1 WP, 1 PT, 1 KT, 3 AT	4	-	4	1.725.000	-	1.725.000	Juni 2021	November 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
71	Reviu HPS 10 Proyek Strategis		--	Tahun 2021 1 P, 1 WP, 1 PT, 1 KT, 3 AT	15	-	15	1.725.000	-	1.725.000	Februari 2021	Desember 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
72	Reviu Kepatuhan Pengelolaan BMD		--	Tahun 2021 1 P, 1 WP, 1 PT, 1 KT, 3 AT	15	-	15	1.725.000	-	1.725.000	Oktober 2021	Desember 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
73	Reviu Penyerapan Anggaran		--	Tahun 2021 1 P, 1 WP, 1 PT, 1 KT, 3 AT	15	-	15	3.600.000	-	3.600.000	Juni 2021	Desember 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
74	Reviu SILTAP DAU		--	Tahun 2021 1 P, 1 WP, 1 PT, 1 KT, 3 AT	4	-	4	3.600.000	-	3.600.000	September 2021	September 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
75	Jasa		--	Tahun 2021 1 P, 1 WP, 1 PT, 1 KT, 3 AT	12	-	12	3.600.000	-	3.600.000	Juni 2021	November 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
76	Reviu Hilbah dana Pariwisata		--	Tahun 2021 1 P, 1 WP, 1 PT, 1 KT, 3 AT	12	-	12	7.425.000	-	7.425.000	Januari 2021	Desember 2021	1	1 PC, 1 Laptop	
77	Reviu DAK		--	Tahun 2021 1 P, 1 WP, 1 PT, 1 KT, 4 AT	12	-	12		-	5.250.000	Januari 2021	Desember 2021	1	1 PC, 1 Laptop	

Ballige, 14 Desember 2021

INSPEKTUR
KABUPATEN TOBA

Drs. WALBEN HUTAHAEAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660609 199203 1 007